

ABSTRAK

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Pasaman merupakan konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang mendiskualifikasi calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution karena tidak memenuhi persyaratan pencalonan. Putusan tersebut memunculkan kembali kompetisi serta dinamika politik lokal di Kabupaten Pasaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik lokal dalam pelaksanaan PSU serta mengidentifikasi hambatan yang terjadi selama pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan KPU, Bawaslu, partai politik, tim pemenangan pasangan calon, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik lokal dalam pelaksanaan PSU ditandai oleh konsolidasi elite politik pascaputusan Mahkamah Konstitusi, penyesuaian koalisi partai politik, penetapan Parulian Dalimunte sebagai calon Wakil Bupati pengganti, serta meningkatnya kompetisi antarpasangan calon melalui strategi kampanye dan mobilisasi dukungan. Hambatan dalam pelaksanaan PSU meliputi keterbatasan pembiayaan, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, keterbatasan waktu pelaksanaan, kuatnya ikatan kekerabatan yang menyulitkan pengawasan terhadap dugaan politik uang, serta kejenuhan pemilih yang berdampak pada tingkat partisipasi. Dengan demikian, pelaksanaan PSU di Kabupaten Pasaman dapat berlangsung secara aman, tertib, dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, meskipun masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan demokrasi substantif di tingkat lokal.

Kata kunci: Dinamika Politik Lokal, Pemungutan Suara Ulang, Pilkada, Elite Politik, Kabupaten Pasaman.

ABSTRACT

The conduct of the Re-vote (PSU) for the Pasaman Regency regional head election was a consequence of Constitutional Court Ruling Number 02/PHPU.BUP-XXIII/2025, which disqualified Vice-Regent candidate Anggit Kurniawan Nasution for failing to meet candidacy requirements. This ruling reignited competition and local political dynamics in Pasaman Regency. This study aims to analyze local political dynamics during the PSU and identify obstacles encountered during its implementation. A qualitative method with a case study approach was employed. Data were gathered through interviews, observations, and documentation involving the General Elections Commission (KPU), the Election Supervisory Body (Bawaslu), political parties, candidate campaign teams, community leaders, and the general public. Data analysis proceeded through stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that local political dynamics during the PSU were characterized by the consolidation of political elites following the Constitutional Court ruling, adjustments to political party coalitions, the designation of Parulian Dalimunte as the replacement Vice-Regent candidate, and intensified competition between candidate pairs through campaign strategies and support mobilization. Obstacles to the PSU implementation included limited funding, suboptimal inter-agency coordination, time constraints, strong kinship ties that complicated the monitoring of alleged vote-buying, and voter fatigue affecting participation rates. Ultimately, the PSU in Pasaman Regency proceeded safely, orderly, and in accordance with applicable legal mechanisms, despite ongoing challenges in achieving substantive democracy at the local level.

Keywords: Local Political Dynamics, Re-vote (PSU), Regional Head Election, Political Elites, Pasaman Regency.